



PEMERINTAH ACEH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Tgk. Bate Timoh No.2. Jeulingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114

Telepon (0651) 22546, Faximil (0651) 33095

E-mail : dinaspppa@acehprov.go.id, Website. www.dinaspppa.acehprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR : 040/ 096

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2023 dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan untuk pelayanan informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
- KETIGA : Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dimutakhirkan paling lama setahun sekali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

KELIMA.../3

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Maret 2023 M
02 Ramadan 1442 H



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

MEUTIA JULIANA, S.STP,M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19780723 199702 2 001

Salinan: dari Keputusan ini disampaikan kepada

- 1 Gubernur Aceh;
- 2 Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Aceh;
- 3 Komisi Informasi Aceh
- 4 Arsip.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR : 040/096
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) SETIAP SAAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2023**

INFORMASI YANG WAJIB DISAMPAIKAN SETIAP SAAT									
NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Keputusan Kepala Dinas	Daftar Surat Keputusan Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Tentatif	√	√	-	
2	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan								
	a. Pedoman pengelolaan organisasi	Pedoman Organisasi 1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi , Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh 2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja UPTD PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Tahun 2016 Tahun 2019	√ √	√ √	√ √	

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Profil lengkap pimpinan dan pegawai	Profil Pimpinan Nama Plt Kepala Dinas : Meutia Juliana, S.STP, M. Si , Pangkat : Pembina Tingkat I, Gol: IV/a Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh saat ini di dukung oleh 100 orang pegawai (54 PNS dan 46 Non PNS yang terdiri dari 30 Laki-laki dan 70 Perempuan) dengan rincian Kepala Dinas, Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala Sub bagian, 13 orang Pejabat Fungsional hasil penyetaraan, 34 orang Pelaksana dan didukung 46 Tenaga Kontrak (non PNS) untuk membantu menjalankan tugas-tugas rutin maupun kegiatan yang ada di dinas.	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Tentatif	√	√	√	
	c. Anggaran Dinas PPPA Aceh	Anggaran dan Sumber Anggaran Tahun 2023 APBA sebesar Rp. 19.905.406.552,-	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/ DaerahAhli Muda Perencana Ahli Muda	Tahun 2023	√	√	√	
		Informasi Terkait PPPA 1. Kelembagaan urusan pemerintahan bidang PPPA Provinsi adalah dinas yang mandiri sedangkan urusan pemerintahan bidang PPPA Kab/Kota bergabung dengan beberapa urusan pemerintah lainnya 2. Profil Kelembagaan Urusan PPPA Kab/Kota	Kepala Bidang DIGA Sekretaris Dinas	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Data Informasi Gender dan Anak Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Setiap Awal Tahun	√	√	√	

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>3. Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak, Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KtPA)</p> <p>4. Produk Layanan Dinas PPPA Aceh adalah UPTD PPA dan Penanganan bagi Korban KTPA melalui UPTD PPA</p> <p>5. IPG dan IDG Provinsi dan Kabu/Kota Aceh</p> <p>6. Indeks Perlindungan Anak (IPA)</p> <p>7. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)</p> <p>8. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</p>	<p>Kepala Bidang PPA</p> <p>Kepala UPTD PPA</p> <p>Kepala Bidang KHPK</p> <p>Kepala Bidang PHA</p> <p>Kepala Bidang PHA</p> <p>Kpala Bidang PPA</p>	<p>Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak</p> <p>Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Seksi PHA Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi</p> <p>Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Kualitas Keluarga</p> <p>Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Seksi PHA Bidang Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya</p> <p>Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Seksi PHA Bidang Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya</p> <p>Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Seksi Perlindungan Khusus Anak</p>	<p>Triwulan</p> <p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p>				

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>9. Indeks Ketahanan Keluarga</p> <p>Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:</p> <p>a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;</p> <p>b. Ketahanan fisik;</p> <p>c. Ketahanan ekonomi;</p> <p>d. Ketahanan sosial psikologi; dan</p> <p>e. Ketahanan sosial budaya.</p> <p>Data yang digunakan dalam publikasi ini bersumber dari berbagai survei yang dilaksanakan KPPPA bersama BPS dan Instansi lain yang berkaitan dengan variabel dan indikator penyusunan ketahanan keluarga</p>	Kepala Bidang KHPK	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Kualitas Keluarga	Tahunan				

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>10. Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah:</p> <p>Penghargaan yang diberikan pada kementerian /lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten /kota yang dinilai telah berkomitmen dan mengimplementasikan strategi yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) di berbagai sektor pembangunan</p> <p>Peraturan Menteri PPPA RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kab/Kota</p> <p>11. Forum Anak</p> <p>Mendorong anak aktif mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi, minat, bakat dan kemampuannya untuk :</p> <p>a. Mengembangkan ruang partisipasi anak.</p> <p>b. Mengembangkan wadah penyaluran aspirasi anak.</p> <p>c. Mempercepat proses pemenuhan hak anak.</p> <p>d. Membangun pranata pengembangan potensi anak.</p>	<p>Kepala Bidang DIGA</p> <p>Kepala Bidang PHA</p>	<p>Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Seksi Data Informasi Gender dan Anak</p> <p>Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Seksi PHA bidang Hak Sipil, Informasi & Partisipasi</p>	Tahun Genap				

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>12. Kab/Kota Layak Anak</p> <p>Merupakan pengembangan kota layak anak bertujuan membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak melalui beberapa tahapan pengembangan Kota Layak Anak dimulai dari tahapan Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan disertai dengan 5 Klaster Pemenuhan Hak anak yang meliputi :</p> <p>a. Hak sipil dan kebebasan</p> <p>b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif</p> <p>c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan</p> <p>d. Pendidikan, pemanfaatn waktu luang dan budaya</p>	Kepala Bidang PHA	Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Seksi PHA bidang Pengasuhan, Pendidikan & Budaya	Setiap Tahun				
3	Informasi tentang surat perjanjian								
	a. Surat perjanjian	Informasi tentang surat perjanjian berikut dengan dokumen pendukungnya	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Jan - Des	√	√	-	
4	Informasi tentang surat dinas								
	a. Surat pimpinan	Informasi surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Jan - Des	√	-	-	

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Informasi tentang penanganan kasus								
	a. Evakuasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Alur Penanganan Kasus pada UPTD PPA Provinsi Aceh <ol style="list-style-type: none"> Mitra/Korban bisa datang sendiri/ rujukan / penjangkauan Diterima oleh petugas pengaduan Dilakukan assesmen kebutuhan Diberi layanan sesuai kebutuhan assesmen Terminasi dan kasus selesai 	Kepala UPTD PPA Provinsi Aceh	KTU UPTD PPA	Tahun 2023	√	√	√	
6	Informasi tentang perbendaharaan dan inventaris								
	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan	Realisasi tahun 2022 Informasi rencana dan capaian program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan <ol style="list-style-type: none"> Realisasi Keuangan : Rp.12.075.159.296,- Realisasi fisik : 99,94% 	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	Setiap Bulan	√	√	√	
	b. SPJ Fungsional	Laporan pertanggungjawaban fungsional	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	Setiap Triwulan	√	-	-	
7	Informasi tentang Renstra dan Renja								
	a. Renstra	Tujuan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda pada Subbag Program, Informasi dan Humas	Setiap 5 Tahun (khusus periode sekarang 4 tahun)	√	√	√	5 Tahun

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>Sasaran</p> <p>Meningkatkan pengarustamaan gender dalam pembangunan</p> <p>Indikator Tujuan</p> <p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p> <p>Indikator Sasaran</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Perlindungan Anak (IPA) Tatal Fertility Rate (TFR) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di unit layanan PPA 							
	b. Renja	<p>Rencana Kerja Tahun 2023</p> <p>Untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara da adil dengan laki-laki, serta membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi ditandai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Membentuk kualitas kinerja aparatur Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Meningkatnya penguatan pemberdayaan perempuan Meningkatnya kualitas implementasi PUG 	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda pada Subbag Program, Informasi dan Humas	Awal Tahun	√	√	√	1 Tahun

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Meningkatnya penguatan layanan dan ketahanan keluarga 6. Meningkatnya kualitas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak 7. Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak 8. Meningkatnya komitmen, koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak							
8	Informasi tentang agenda Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Agenda kerja pimpinan	Jadwal kerja pimpinan sesuai tupoksi Dinas PPPA	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Setiap Bulan/Awal Tahun	√	√	-	
9	Informasi tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Aceh								
	a. Profil UPTD PPA	UPTD PPA TUGAS UPTD PPA merupakan perangkat teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak	Kepala UPTD PPA	Kasubag Tata Usaha	Tahun 2019	√	√	√	

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>FUNGSI</p> <ol style="list-style-type: none">1. Layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan2. Layanan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum3. Layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami diskriminasi4. Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus5. Layanan bagi perempuan dan anak mengalami permasalahan lainnya bidang PPPA6. Penerimaan pengaduan dan klarifikasi7. Pengelolaan tindaklanjut kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak8. Pengembangan sistem rujukan9. Perlindungan sementara/rumah perlindungan10. Mediasi11. Pendampingan dan pemulihan <p>Berkedudukan di Jalan Tgk. Bate Timoh Nomor 2 Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh</p>							

NO.	DAFTARI INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		HOTLINE UPTD PPA DINAS PPPA ACEH : 0811 6808 875 Telp. UPTD PPA 0812 9588 0911, 0852 6274 8875 dan 0852 6274 8934 Fax. UPTD PPA 0651 33095 Email UPTD PPA uptdpaaaceh@gmail.com JENIS LAYANAN <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan Masyarakat 2. Penjangkauan Korban 3. Pengeloaan Kasus 4. Penampungan Sementara 5. Mediasi 6. Pendampingan Korban 							



Banda Aceh, 24 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH

MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19780723 199702 2 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR : 040/096
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) BERKALA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2023**

INFORMASI YANG WAJIB DISAMPAIKAN SECARA BERKALA									
NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Informasi tentang Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Profil Dinas Pemberdayaan	<p>Ruang Lingkup</p> <p>Dinas PPPA Aceh berdomisili di Jl. Tgk. Bate Timoh No. 2 Banda Aceh</p> <p>Ruang lingkup menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh</p> <p>Tugas</p> <p>Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai tugas mmelaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak</p>	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Dinas PPPA, 2016	√	√	√	Selama Berlaku

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		<p>3 Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, (Dra. Teja Sekar Tanjung) Analisis Kebijakan Ahli Muda Data dan Informasi Gender, (Nofita Yulandari D, S.Kep) Plt. Sub Koordinator Data dan Informasi Anak, (Devi Purnamasari, SKM, MPH) Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi, (Asmulyadi, S.Sos)</p>							
		<p>4 Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, (Amrina Habibi, SH) Sub Koordinator Pengasuhan, Pendidikan dan Budaya, (-) Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, (Devi Irlainy, S.Sos) Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (Chairil Amri, S.Sos, MM)</p>							
		<p>5 Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (Ir. Yuslita, MM). Sub Koordinator Perlindungan Perempuan, (Sri Wahyuni, Sp. M.Si). Penyuluh Sosial Ahli Muda Perlindungan Khusus Anak, (Isnaniah, A.Md.Kep). Penyuluh Sosial Ahli Muda Data Kekerasan Perempuan dan Anak, (Tiara Sutari AR, S.STP).</p>							
		<p>6 Kepala UPTD PPA Aceh (Dra. Ir. Mayani) Subbagian Tata Usaha (Faula Mardaliya, SE) Seksi Pengaduan dan Klarifikasi (M. Nur, S. TP) Seksi Tindak Lanjut Kasus (Ns. Nurjanisah, Skep, M. Kep)</p>							

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	c. Visi dan Misi	<p>Visi</p> <p>Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani</p> <p>Misi</p> <p>Mewujudkan Akses dan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Mudah, Berkualitas dan Terintegrasi</p> <p>Tujuan</p> <p>Untuk mencapai visi di atas misi, maka tujuan yang harus dijalankan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pencapaian kinerja yang berkualitas2 Penguatan berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender3 Peningkatan kualitas hidup perempuan dan partisipasi dalam politik4 Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) kepada SKPA dan pemerintah daerah5 Penguatan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan SIGA sebagai acuan propinsi dan Kab/Kota6 Membangun sistim layanan terpadu, integrated dan holistik dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda Subbag Program, Informasi dan Humas	Periode Tahun 2017-2022 dan 2023-2026	√	√	√	5 Tahun dan 4 Tahun

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	d. Rencana Strategis	<p>Sasaran</p> <p>Sasaran yang ingin dicapai Dinas PPPA Aceh sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan2 Meningkatnya kesejahteraan perekonomian perempuan melalui pengembangan industri rumahan3 Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PPRG4 Meningkatkan partisipasi/ peran aktif perempuan potensial atau kader partai di bidang sosial, politik dan5 Meningkatnya ketahanan keluarga6 Meningkatnya partisipasi organisasi/lembaga atau forum dalam msayarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem data gender dan anak8 Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak9 Meningkatkan kualitas perlindungan dan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan KLA10 SKPA/ gugus tugas KLA Propinsi dan Kab/ Kota dan Forum Anak11 Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan meningkatnya kualitas penanganan korban12 Berkurangnya tindak kekerasan akibat dimedia online13 Mengoptimalkan sistem perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda Subbag Program, Informasi dan Humas	Dinas PPPA, 2017-2022	√	√	√	5 Tahun dan 4 Tahun

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	e Sumber Daya Manusia yang dimiliki	Jumlah Pegawai PNS/Non PNS Jumlah Pegawai 100 Orang Perincian 54 PNS dan 46 Non PNS terdiri dari Laki-laki = 30 dan Perempuan = 70 Jumlah Pegawai Menurut Golongan Golongan II : 3 Orang (L=1 dan P=2) Golongan III : 34 Orang (L=6 dan P=28) Golongan IV : 17 Orang (L=3 dan P=14) Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan SD : 1 orang (L=0 dan P=1) SLTA : 21 Orang (L = 11 dan P= 10) D-3 : 6 Orang (L= 4 dan P=2) S-1 : 52 Orang (L = dan P= 39) S-2 : 20 Orang (L= 21 dan P= 17)	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	
2	Informasi Ringkasan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Nama Program dan Kegiatan	Dalam upaya untuk mewujudkan sasaran dan outcome, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai 6 program teknis PPPA dan kegiatannya masing-masing, yaitu: Program Peningkatan Kualitas Keluarga <div><div>1</div>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</div> <div><div>2</div>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</div>	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda Subbag Program, Informasi dan Humas	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		<p>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>1 Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</p> <p>2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan kewenangan Provinsi</p> <p>Program Perlindungan Perempuan</p> <p>1 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</p> <p>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</p> <p>1 Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>1 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</p> <p>2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</p>							

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		Program Perlindungan Khusus Anak 1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	b. Penanggung jawab dan Pelaksana Program	Penanggung Jawab Plt .Kepala Dinas, Meutia Juliana,S.STP,M.Si Pelaksana APBA : 1 Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum, (Syahrizal, S.Sos) 2 Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ekonomi, (Inayah, SP, MP) 3 Analis Kebijakan Ahli Muda Sistem Data dan Publikasi Informasi, (Asmulyadi, S.Sos) 4 Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, (Chairil Amri, S.Sos, MM) 5 Penyuluh Sosial Ahli Muda Data Kekerasan Perempuan dan Anak, (Tiara Sutari AR, S.STP). 6 Seksi Pengaduan dan Klarifikasi (M. Nur, S. TP)	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP																																																																																																															
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE																																																																																																																
	c. Target dan Capaian Program dan Kegiatan	<table><tr><th>NO.</th><th>INDIKATOR KINERJA</th><th>SATUAN</th><th>TARGET</th><th>REALISASI</th><th>CAPAIAN KINERJA</th><th>KET</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</td></tr><tr><td>1</td><td>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPI dan laporan keuangan)</td><td>%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA PEREMPUAN</td></tr><tr><td>2</td><td>Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan, Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)</td><td>SKPA</td><td>25 SKPA</td><td>44 SKPA</td><td>176%</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</td></tr><tr><td>3</td><td>Terbentuknya PUSPAGA di Aceh</td><td>PUSPAGA</td><td>1 PUSPAGA</td><td>NIHIL</td><td>Capaian sudah melebihi target</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi</td><td>Orang</td><td>50 Orang</td><td>50 Orang</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</td></tr><tr><td rowspan="2">5</td><td>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</td><td>%</td><td>80%</td><td>100%</td><td>125%</td><td></td></tr><tr><td>Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan</td><td>%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</td></tr><tr><td>6</td><td>Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak</td><td>Kab/Kota</td><td>9 Kab/Kota</td><td>9 Kab/Kota</td><td>100%</td><td></td></tr><tr><td colspan="7">PROGRAM PENGELOLAAN SYSTEM DATA GENDER DAN ANAK</td></tr><tr><td>7</td><td>Jumlah kab/kota yang menyediakan data terolah gender dan anak</td><td>Kab/Kota</td><td>23 Kab/Kota</td><td>23 Kab/Kota</td><td>100%</td><td></td></tr></table>	NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET	1	2	3	4	5	7		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							1	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPI dan laporan keuangan)	%	100%	100%	100%		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA PEREMPUAN							2	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan, Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	SKPA	25 SKPA	44 SKPA	176%		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							3	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	PUSPAGA	1 PUSPAGA	NIHIL	Capaian sudah melebihi target		4	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Orang	50 Orang	50 Orang	100%		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80%	100%	125%		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100%	100%	100%		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							6	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100%		PROGRAM PENGELOLAAN SYSTEM DATA GENDER DAN ANAK							7	Jumlah kab/kota yang menyediakan data terolah gender dan anak	Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%		Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda Subbag Program, Informasi dan Humas	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	
NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KET																																																																																																																		
1	2	3	4	5	7																																																																																																																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI																																																																																																																								
1	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (LKPI dan laporan keuangan)	%	100%	100%	100%																																																																																																																			
PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA PEREMPUAN																																																																																																																								
2	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan, Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG)	SKPA	25 SKPA	44 SKPA	176%																																																																																																																			
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA																																																																																																																								
3	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	PUSPAGA	1 PUSPAGA	NIHIL	Capaian sudah melebihi target																																																																																																																			
4	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Orang	50 Orang	50 Orang	100%																																																																																																																			
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																																																																																																																								
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80%	100%	125%																																																																																																																			
	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100%	100%	100%																																																																																																																			
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																																																																																																																								
6	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	Kab/Kota	9 Kab/Kota	9 Kab/Kota	100%																																																																																																																			
PROGRAM PENGELOLAAN SYSTEM DATA GENDER DAN ANAK																																																																																																																								
7	Jumlah kab/kota yang menyediakan data terolah gender dan anak	Kab/Kota	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota	100%																																																																																																																			
	d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kegiatan dilaksanakan Januari s.d Desember 2023	Sekretaris, Kabid. KHPK, Kabid DIGA, Kabid. PHA, Kabid. PPA dan Kepala UPTD PPA	Para PPTK	Dinas PPPA, 2023	√	√	√																																																																																																																
	e. Anggaran Program	Anggaran dan sumber anggaran tahun 2023 Nilai Anggaran sebesar Rp. 19.905.406.552,- PAA = Rp. 6.321.350.238,- DBH = Rp. 566.131.310,- DAU = Rp. 4.160.268.832,- DNFISIK = Rp. 375.000.000 OAACEH = Rp. 1.500.000.000 SPPA = Rp. 6.932.650.172,- SMIGAS = Rp. 50.000.000,-	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda Subbag Program, Informasi dan Humas	Dinas PPPA, 2023	√	√																																																																																																																	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	f. Agenda Penting	<p>Rapat Koordinasi Pembangunan PPPA Aceh pada Juni-Juli 2023</p> <p>Dalam upaya memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak di pusat, provinsi dan kabupaten/kota</p> <p>Hari Anak direncanakan pada Juli 2023</p> <p>Menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif keluarga, masyarakat, dunia usaha, Pemerintah dan Negara dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk mewujudkan peningkatan perlindungan dan tumbuh kembang anak.</p> <p>Hari Ibu direncanakan pada 22-25 Desember</p> <p>Perjalanan sejarah yang melatarbelakangi Peringatan Hari Ibu dari awal ditetapkan hingga saat ini, memperlihatkan jejak perjuangan perempuan Indonesia yang telah menempuh jalan panjang untuk mewujudkan peranan dan kedudukan perempuan Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Bibit kebangkitan perjuangan perempuan Indonesia telah dimulai sebelum masa kemerdekaan, yang ditandai perjuangan pendekar perempuan diberbagai tempat di Indonesia, seperti Tjuk Njak Dien di Aceh, Nji Ageng Serang di Jawa Barat, R.A Kartini di Jawa Tengah, serta masih banyak lagi yang lain</p>	<p>Sekretaris Dinas</p> <p>Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak</p> <p>Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga</p>	<p>Kasubbag. Hukum, Kepegawaian dan Umum</p> <p>Penyuluh Sosial Ahli Muda Seksi PHA Bid. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p> <p>Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi KHP Bidang Ekonomi</p>	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
3	Informasi tentang kinerja dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh								
	a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban	<p>Gambaran Kinerja yang dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam target yang telah ditetapkan dalam tahun 2022</p> <p>Pada tahun 2022 pengukuran kinerja Dinas PPPA dilakukan melalui 6 Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Pemilihan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Dinas PPPA Aceh, didasarkan pada pertimbangan daya ungkit yang besar terhadap proses pembangunan Aceh khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian kinerja Dinas PPPA Tahun 2022 :</p> <p>a. Capaian indikator ke 1 pada yaitu Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu (LKPJ dan Laporan Keuangan), walau capaian setiap tahunnya 100% atau kategori SANGAT BAIK</p> <p>b. Capaian indikator ke 2 yaitu Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi dengan capaian kinerja 100% atau kategori SANGAT BAIK, namun apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra capaian hanya sebesar 53,11% atau dengan kategori KURANG.</p> <p>c. Capaian indikator ke 3 yaitu Persentase SKPA yang Melaksanakan Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender (PPRG) dengan capaian 93,62% atau kategori BAIK, walau implementasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan implementasi PPRG sudah semakin baik dan meningkat berkat upaya keras Driver PUG dan audit Inspektorat, namun tidak dibarengi dengan meningkatnya jumlah Anggaran yang Responsif Gender (ARG).</p>	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		<p>d. Capaian indikator ke 4 yaitu Terbentuknya PUSPAGA di Aceh dengan capaian 114,29% atau kategori SANGAT BAIK, melebihi target karena komitmen Kab/Kota sangat tinggi. Perlu menjadi perhatian terhadap fungsi layanan PUSPAGA tersebut beserta SDMnya di Kab/Kota agar dapat meningkatkan kinerjanya.</p> <p>e. Capaian indikator ke 5 yaitu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dengan capaian hanya 52,08% atau dengan kategori KURANG, memang setiap tahunnya jumlah kasus yang memerlukan bantuan pendampingan hukum memerlukan waktu yang cukup panjang dan berbeda setiap kasusnya, sehingga terkadang kasus yang muncul mendekati akhir tahun tentu tidak akan selesai pada tahun tersebut.</p> <p>f. Indikator ke 6 yaitu Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan capaian sebesar 100% atau kategori SANGAT BAIK, hal ini terbantu karena permasalahan yang ditangani hanya 1 kasus. Namun tidak terlepas dari SDM yang menangani dan pelik tidaknya kasus tersebut.</p> <p>g. Indikator ke 7 yaitu Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak dengan capaian sebesar 100% atau dengan kategori SANGAT BAIK, namun apabila dibandingkan dengan target Renstra maka capaian hanya sebesar 56,25% atau dengan kategori KURANG, perlu menjadi perhatian khusus disebabkan capaian kinerja pada setiap tahunnya dibandingkan dengan target Renstra hanya pada tahun 2022 saja yang tercapai.</p>							

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
		h. Indikator ke 8 yaitu Jumlah Kab/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dengan capaian sebesar 100% atau kategori SANGAT BAIK, walau belum semua Kab/Kota dilakukan pendampingan namun semua Kab/Kota telah memahami dan menggunakan Sistem Data Gender dan Anak dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak. h. Indikator ke 9 yaitu Jumlah Kab/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) dengan capaian sebesar 100% atau kategori SANGAT BAIK, walau belum semua Kab/Kota dilakukan pendampingan namun semua Kab/Kota telah memahami dan menggunakan Sistem Data Gender dan Anak dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.							
	b. Laporan seluruh program dan kegiatan yang telah dijalankan	Realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda Subbag Program, Informasi dan Humas	Dinas PPPA, 2023	√	√	-	
	c. Laporan umum	Informasi terkait kegiatan yang akan, sedang dan telah berlangsung :	Sekretaris, Kabid. KHPK, Kabid DIGA, Kabid. PHA, Kabid. PPA dan Kepala UPTD PPA	Para PPTK	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
4	Ringkasan laporan keuangan								
	a. Laporan realisasi fisik dan keuangan	Realisasi Akhir Tahun 2022 Informasi rencana dan capaian program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan Realisasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Aceh pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebesar 94,27 % atau sebesar Rp 12.075.159.296,- dari pagu Rp 12.809.337.335-.	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda Subbag Program, Informasi dan Humas	Dinas PPPA, 2023	√	√	-	
	b. Neraca	Periode 31 Desember 2022 Total kewajiban dan ekuitas	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda Subbag Keuangan dan Pengelola Aset	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	
	c. Arus kas	Laporan dan catatan arus kas sesuai standar akuntansi	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda Subbag Keuangan dan Pengelola Aset	Awal Tahun	√	√	-	
	d. Daftar aset dan inventaris	Ringkasan daftar aset dan inventaris setelah rekon aset per 31 Desember 2022 Bidang Tanah Unit Alat-alat besar Unit Alat-alat angkutan Unit Alat bengkel dan alat ukur Unit Alat kantor dan rumah tangga Unit Alat studio dan komunikasi Bangunan gedung Bangunan air/irigasi Instalasi Jaringan Buku dan perpustakaan Barang bercorak kebudayaan	Sekretaris Dinas	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda Subbag Keuangan dan Pengelola Aset	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
5	Ringkasan laporan akses informasi publik								
	a. Permintaan informasi publik di DPPPA	Daftar permintaan informasi publik di DPPPA Dari 29 informasi yang diharapkan, terpenuhi sebanyak 27 informasi	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda Subbag Program, Informasi dan Humas	Jan - Des Tahun 2022	√	√	√	
	b. Waktu yang diperlukan terkait permintaan informasi	Rentang waktu 1. Jawaban atas informasi selambatnya 10 hari 2. Dapat diperpanjang dengan pemberitahuan selama 7 hari	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	Selama Berlaku
	c. Permintaan informasi yang ditolak DPPPA	Daftar informasi yang ditolak DPPPA Terdapat 2 pemohon yang tidak mendapatkan data dan informasi sesuai permohonan 1 Data Tindak Pidana Perkosaan terhadap Keluarga sedarah (incest) 2 Data Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana bullying /Perundungan	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi	Jan - Des	√	√	-	
	d. Alasan penolakan informasi	Dikarena tidak tersedia nomor kontak pada Surat Permohonan konfirmasi Penolakan permintaan informasi dikarenakan tidak ada data yang dilaporkan pada UPTD PPA Aceh	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi	Jan - Des	√	√	-	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
6	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Dinas PPPA Aceh								
	a. Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan	<p>Rancangan peraturan terkait PPPA</p> <p>Daftar rancangan peraturan terkait PPPA yang berdampak pada publik tahun 2023</p> <div><div>1.</div><div>Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Ruang Bermain Ramah Anak</div></div> <div><div>2.</div><div>Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Secara Terpadu</div></div> <div><div>3.</div><div>Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kewajiban Aparatur Sipil Negara Dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Paska Putusan Perceraian</div></div> <p>Daftar peraturan terkait PPPA yang berdampak pada publik tahun 2022</p> <div><div>1.</div><div>Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Ruang Bermain Ramah Anak</div></div> <div><div>2.</div><div>Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kewajiban Aparatur Sipil Negara Dalam Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Paska Putusan Perceraian</div></div> <div><div>3.</div><div>Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Secara Terpadu</div></div> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar Penyelenggaraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dan UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh</p>	Sekretaris Dinas dan Para Kepala Bidang	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Tahun 2023	√	-	-	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
	b. Peraturan, keputusan atau kebijakan yang telah diterbitkan	Peraturan Perundang-undangan Daftar peraturan perundang-undangan dan keputusan yang telah diterbitkan terkait PPPA <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang 2 Peraturan Pemerintah 3 Instruksi Presiden 4 Peraturan Menteri 5 Qanun 6 Peraturan Gubernur 7 Surat Keputusan Gubernur 8 Surat Edaran Gubernur 9 Keputusan Kepala Dinas 	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Setiap Tahun	√	√	√	Selama Berlaku
7	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik								
	a. Proses memperoleh informasi	Tata cara memperoleh informasi, pengajuan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik <ol style="list-style-type: none"> 1 Permohonan informasi hard copy, soft copy atau on line melalui form yang tersedia 2 Petugas melakukan pencatatan permohonan informasi 3 Pemberitahuan permohonan informasi diterima/ditolak melalui form yang tersedia 4 Penyerahan informasi dibuktikan dengan form yang tersedia 	Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak	Analisis Kebijakan Ahli Muda Seksi Sistem Data dan Publikasi Informasi	Dinas PPPA, 2021	√	√	√	Selama Berlaku
	b. Personal helpdesk	Contact Person yang dapat dihubungi terkait permintaan informasi publik Rostina, SKM, MKM , Hp: 082298392542	Sekretaris Dinas	Perencana Ahli Muda Subbag Program, Informasi dan Humas	Dinas PPPA, 2023	√	√	√	

NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
8	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan terkait								
	a. Pengadaan Barang dan Jasa	Informasi rencana dan pemenang tender	Sekretaris Dinas	Kasubbag Hukum, Kepegawaian dan Umum	Jan - Des	√	√	-	
9	Informasi tentang prosedur peringatan dini								
	a. Prosedur evakuasi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Alur Penanganan Kasus pada UPTD PPA <div>1 Mitra/Korban bisa datang sendiri/rujukan/ penjangkauan</div> <div>2 Diterima oleh petugas pengaduan</div> <div>3 Dilakukan assesmen kebutuhan</div> <div>4 Diberi layanan hukum/psikolog/rohaniawan sesuai kebutuhan</div> <div>5 Mediasi, penampungan sementara dan pendampingan</div> <div>6 Terminasi dan kasus selesai</div>	Kepala UPTD PPA	KTU UPTD PPA	UPTD PPA	√	√	-	Selama Berlaku



Medan Aceh, 24 Maret 2023

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH

MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 19780723 199702 2 001

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) SERTA MERTA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2023

INFORMASI YANG WAJIB DISAMPAIKAN SECARA SERTA MERTA									
NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	Informasi tentang penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak								
	a. Mekanisme pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Informasi tentang penyelenggaraan fungsi pelayanan pengaduan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Kepala UPTD PPA	Kepala Seksi Pengaduan dan Klarifikasi	Setiap Kejadian	√	√	√	Selama Berlaku
	b. Mekanisme penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Informasi tentang penyelenggaraan fungsi pelayanan penanganan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan		Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus	Setiap Kejadian	√	√	√	Selama Berlaku

Banda Aceh, 24 Oktober 2023
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780723 199702 2 001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
NOMOR : 040/096
TENTANG : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DIKECUALIKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH
TAHUN 2023**

INFORMASI WAJIB YANG DIKECUALIKAN									
NO.	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	RINGKASAN ISI INFORMASI	PEJABAT/UNIT/ SATKER YANG MENGUASAI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA			JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ATAU RETENSI ARSIP
						HARD COPY	SOFT COPY	ON LINE	
1	Informasi tentang penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak								
	a. Identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri pelaku,korban dan saksi korban	Informasi identitas yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat diungkap apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Kepala UPTD PPA	Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus	Setiap Kejadian	-	-	-	
	b. Nama terang tersangka,korban, saksi, ahli, dan pelopor	Informasi identitas yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, dapat diungkap apabila ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Kepala UPTD PPA	Kepala Seksi Pengaduan dan Klarifikasi	Setiap Kejadian	-	-	-	
	c. Berkas perkara kasus yang informasinya dikecualikan	Sampai telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Kepala UPTD PPA	Kepala Seksi Tindak Lanjut Kasus	Setiap Kejadian	-	-	-	

Banda Aceh, 24 Maret 2023
Kepala DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK ACEH

MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780723 199702 2 001

